

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2002- 2019

Analysis of The Factors That Affect The Local Revenue Of Wonosobo district in 2002-2019

¹⁾Lia Tri Pratiwi, ²⁾Lorentino Togar Laut, ³⁾Gentur Jalunggono

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Abstrak

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan satu variabel dependen dan empat variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo. Untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan PDRB Kabupaten Wonosobo terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang penting bagi sebuah daerah, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah tinggi berarti kemandirian Pemerintah Daerah semakin berkurang. Banyak faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan setiap daerah mempunyai faktor yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Ordinary Least Square* (OLS), Kabupaten Wonosobo.

Abstract

PAD as one of the regional revenues, reflects the level of regional independence. The purpose of this study was to determine the factors that affect the Regional Original Income (PAD) of Wonosobo Regency. This research is an experimental research with one dependent variable and four independent variables. The data used in this study is secondary data taken from the Central Statistics Agency (BPS) Wonosobo Regency. To determine the effect of government spending, population and GRDP of Wonosobo Regency on Regional Original Income, this study uses Ordinary Least Square (OLS). The results of the study show that all independent variables, namely Government Expenditure, GRDP, Total Population, and Per capita Income have an effect on the dependent variable, namely Regional Original Income (PAD). Regional Original Income (PAD) is an important thing for a region, when the Regional Original Income (PAD) of a region is high, it means that the independence of the Regional Government is decreasing. Many factors affect Regional Original Income (PAD) and each region has different factors.

Keywords: Regional Original Income, Ordinary Least Square (OLS), Wonosobo Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hibzon (2017), dalam proses pembangunan dan pelayanan publik sebagian besar dana yang dipergunakan adalah berasal dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi (Zuwesty, 2015). Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik. Untuk itu harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pendapatan

Perkapita. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Bagus, 2014).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional

(GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian (Mangkoesebroto, 1998 dalam Sitaniapessy, 2013).

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejala ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di daerah menggambarkan adanya gejala ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10% apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan indriayu (2019), untuk mengurangi angka inflasi dan pengangguran di suatu daerah perlu dilakukan perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang bagus dan matang.

Tabel 1. Data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
Kab. Wonosobo	0,968	Sedang
Kab. Banjarnegara	1,036	Tinggi
Kab. Banyumas	2,026	Sangat Tinggi
Kab. Kebumen	1,380	Tinggi
Kab. Magelang	1,494	Tinggi

Sumber:Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019

Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dimaksud menggunakan data realisasi APBD dan laporan anggaran. Table diatas memperlihatkan bahwa KFD Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori sedang dengan indeks 0,968. Sebagai pembanding untuk sebagian besar indeks KFD Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sudah berada ditingkat yang tinggi bahkan beberapa daerah masuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Wonosobo belum mampu mendanai kebutuhan fiskal dan tergantung dengan transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU atau DAK.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, DAU adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang di maksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Berikut adalah data dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Wonosobo:

Tabel 2. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Wonosobo

No	Tahun	DAU
1	2002	241.770.000.000
2	2003	237.310.000.000
3	2004	237.320.128.000
4	2005	244.000.000.000
5	2006	359.723.000.000
6	2007	389.517.976.000
7	2008	427.667.190.000
8	2009	431.742.990.000
9	2010	457.647.569.400
10	2011	486.041.113.000
11	2012	597.858.484.000
12	2013	597.858.484.000
13	2014	724.245.009.000
14	2015	748.447.761.000
15	2016	841.407.175.000
16	2017	841.407.175.000
17	2018	827.791.657.000
18	2019	872.953.362.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo

Dari tabel di atas terlihat bahwa dana transfer dari pemerintah berupa Dana

Alokasi Umum dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami

peningkatan. Yang berarti bahwa kemandirian keuangan Daerah di Kabupaten Wonosobo masih belum mencukupi kebutuhan fiskal daerah.

Prakosa (2017), mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Kabupaten Wonosobo belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal.
- 2) Belum diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Wonosobo.

- 3) Ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

Rumusan Masalah

Persoalan pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat yang berupa DAU dan DAK. Adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo. Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan perkapita. Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk merupakan hubungan

fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo?
- 2) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo?
- 3) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo?
- 4) Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo?

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas dapat diperoleh bahwa tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis pengaruh Faktor Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo.
- 2) Menganalisis pengaruh apakah Faktor PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo.
- 3) Menganalisis pengaruh Faktor Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo?

- 4) Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo?

Manfaat Penelitian

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo serta dapat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti pengeluaran pemerintah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita di Kabupaten Wonosobo dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya merumuskan suatu kebijakan pembangunan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Simanjuntak, (2010: 102) dalam bahasa Yunani, *auto* berarti “sendiri” dan *nomos* berartikan “hukum” atau “peraturan”. Dalam Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sedangkan menurut Suryaningrat (1985), istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Regional autonomy is the right and authority of each region to regulate its own region* (Casson, 2012).

Menurut simanjuntak (2010: 70), mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Hakikat otomi daerah adalah upaya memperdaya daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Sedangkan menurut Simanjuntak, (2010: 66) mendefinisikan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerah dengan baik, tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah, dengan masyarakat sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undang.

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004: 66, otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom, dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Landiyanto, 2015). Holland (2020), *Regional autonomy is used in several countries as a way for each region to play its own role*. Direktorat Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang otonomi daerah (Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Dengan semakin banyaknya dana yang ditransfer ke daerah, kebijakan terkait anggaran dan penggunaannya akan semakin efektif, selama daerah tersebut dapat dikelola secara profesional. Diharapkan dengan penguatan sumber pendapatan

daerah dan penyediaan belanja daerah yang dapat digunakan secara bebas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan tingkat pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mereka layani sangat dekat, sehingga pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan prioritas lokalnya. Dalam kurun waktu mendatang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, serta mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut undang-undang, fungsi-fungsi tertentu yang telah menjadi tanggung jawab daerah akan didistribusikan kembali ke pusat melalui peraturan yang lebih rendah (peraturan pemerintah / peraturan presiden / peraturan menteri) atau undang-undang departemen. Ada juga ketidakkonsistenan dalam pendanaan. Pada dasarnya pengaturan pembagian fungsi hukum membuat kabupaten lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat hanya bertanggung jawab terhadap urusan kedaulatan negara dan bertanggung jawab dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan standar

(NSPK), norma, standar, prosedur dan standar tersebut akan menjadi acuan setiap daerah dalam melaksanakan urusannya. Padahal, pemerintah pusat masih banyak melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Desentralisasi Fiskal

Kebijakan otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang keduanya telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Seimbang UU No. 33 dan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ini merupakan respon atas permintaan reformasi 1998. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas daerah dalam rangka pengaturan dan penanganan urusan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sektor fisik, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga membawa manfaat

makro dan mikro bagi perekonomian daerah.

Reformasi fiskal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas penggunaan keuangan negara, dan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan kekuasaan pemerintah daerah secara efektif dapat tercermin dalam pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, fungsi pemerintahan daerah tersebut dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini cenderung berdampak biaya yang lebih besar, sehingga penggunaan keuangan nasional kurang efisien. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah juga berharap dapat mewujudkan keadilan horizontal dan vertikal serta mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik.

Dukungan Kebijakan Pendanaan

Kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia juga dicirikan oleh besarnya proporsi dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara umum, dana perimbangan menyumbang lebih dari 85% pendapatan APBD daerah / kota, dan sekitar 70% dari rata-rata pendapatan APBD provinsi.

Proporsi yang besar menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat bergantung pada keuangan pemerintah pusat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi pemerintah daerah dalam jangka panjang, terutama dalam proses peningkatan PAD sebagai sumber dana daerah. Oleh karena itu, perubahan dalam pengelolaan keuangan nasional ini juga harus memiliki fleksibilitas daerah yang memadai dalam penggunaan sumber-sumber pendanaan utama tersebut.

Dalam rangka membangun sumber pendanaan daerah, pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah yang menyempurnakan pengaturan tentang pajak dan pemungutan daerah. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menguraikan bahwa salah satu tujuan perubahan kebijakan perpajakan daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui serangkaian strategi, antara lain (1) menerapkan sistem daftar tertutup untuk menentukan jenis pajak daerah. (2) Meningkatkan kekuasaan otoritas

perpajakan daerah dengan meningkatkan kekuasaan perpajakan daerah, (3) Menerapkan sistem preventif dan korektif, kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan dan perpajakan daerah; (4) Meningkatkan pengelolaan perpajakan daerah dan perpajakan daerah sehingga dapat memberikan Peradilan yudisial dan meningkatkan kualitas penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Awaniz (2011: 19), Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Sedangkan menurut Halim (2016: 127), menjelaskan bahwa Dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan

di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Proporsi DAU untuk daerah Kabupaten/ Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada PP No. 104 Tahun 2006.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Halim (2016: 16), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/ 2005, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

- 1) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
- 2) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan

- 3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2014:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. *All results obtained from the region will go to the region's original income* (Carrilo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk

membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Sumber-Sumber PAD

Menurut Abdul Halim (2016: 96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

- 1) Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD

Adapun hubungan pendapatan daerah dengan beragam variabel fisik dan sosial ekonomi adalah untuk mengidentifikasi variabel mana yang mempunyai pengaruh terbanyak terhadap penerimaan pendapatan daerah. Meskipun perbedaan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetapi terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi penyebab utama perbedaan pendapatan daerah:

Faktor Geografis.

Apabila suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumber daya nasional,

sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik.

Faktor Historis

Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk pekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplotasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberisedit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.

Faktor Politik

Ketidak stabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Tidak stabilnya suhu politik sangat memengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi disuatu wilayah tidak akan berkembang. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan

ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan.

Faktor Administrasi (birokrasi)

Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.

Faktor Sosial

Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang tidak memiliki lembaga dan keinginan (attitude) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.

Faktor Ekonomi

Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (spread) dan pasar tidak

sempurna, berlangsung dan menambah perbedaan dalam pembangunan ekonomi.

Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016). Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pendekatan Perhitungan PDRB

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan antara lain:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

2) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa

faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4) Metode Alokasi

Metode alokasi digunakan pada data data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah dari suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang ditingkatnya lebih tinggi, seperti data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi. Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat digunakan salah satu dari

penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + (x - m) \quad (1)$$

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga,

I = pembentukan modal,

G = pengeluaran pemerintah, dan

(x - m) = selisih nilai ekspor dan impor

Perlu disepakati bahwa I (investasi) dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif. Untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat diketahui melalui pendekatan model pertumbuhan neo klasik dengan memusatkan perhatian pada fungsi produksi cobb-douglas. Menurut Arsyad (1999), fungsi produksi cobb-douglas tersebut dapat dituliskan dengan cara berikut:

$$Y = ALK \quad (2)$$

Y = total produksi,

L = tenaga kerja,

K = modal,

A = produktivitas faktor total,

Dalam penghitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi. Ini sesuai dengan pembagian yang digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional. Pembagian ini analisis untuk membandingkan PDRB antar provinsi dan antara PDRB dengan PDB.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Pengeluaran pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menurut Bastian (2016), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun takwim dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Sementara menurut Mardiasmo (2015), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran- ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut keputusan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan perhitungan APBD, menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang belanja

daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat: 2010). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penduduk

Pengetahuan tentang kependudukan adalah sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun Pemerintahan baik ditingkat Nasional maupun daerah, dimana masalah kependudukan saat ini telah memegang peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah

terutama yang berhubungan dengan pendataan penduduk melalui KTP, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, pemindahan penduduk dan sebagainya. Hal mengenai kependudukan adalah Studi tentang penduduk di dalam kerangka sosiologi dan ada jalinannya dengan ekonomi, biologi dan ilmu sosial yang lain. Merencanakan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk memandu pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, guna mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas kependudukan di semua aspek kependudukan. Perkembangan kependudukan merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan perubahan kondisi kependudukan, perubahan kondisi kependudukan dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat juga dipengaruhi olehnya.

Pengertian dari penduduk sendiri sangatlah banyak, dalam ilmu sosiologi penduduk adalah Kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan secara umum

penduduk adalah Semua Orang yang berdomisili di Wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Wilayah Republik Indonesia.

Bicara mengenai penduduk tak pernah lepas dari pertumbuhan penduduk tersebut. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah di pengaruhi oleh 4 faktor yaitu Kelahiran (*fertilasi*), Kematian (*mortalitas*), *In Migrasion* (migrasi masuk), *Out Migrasion* (migrasi keluar). Faktor paling dominan yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Kelahiran dan Kematian sedangkan Migrasi masuk dan Migrasi Keluar sangatlah rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Fertilasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Faktor Demografi dan Faktor Non Demografi. Faktor Demografi diantaranya adalah Struktur Umur, Status Perkawinan dan Umur Kawin, sedangkan Faktor Non Demografi nya antara lain Keadaan ekonomi penduduk, Tingkat pendidikan, Perbaikan status wanita, Urbanisasi dan Industrialisasi. Komposisi umur penduduk merupakan salah faktor komponen penduduk antara lain penduduk berusia antara 0-4 tahun akan banyak mempengaruhi tingkat kematian sedangkan

tingkat kelahiran sangat dipengaruhi oleh penduduk wanita pada usia 15-49 tahun.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bawa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk.

Manfaat Pendapatan Perkapita

Menurut Adji, Wahyu (2007) dkk mengatakan bahwa pendapatan perkapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, standar pertumbuhan kemakmuran negara, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. Berikut penjelasan tiap-tiap manfaat pendapatan perkapita adalah:

- 1) Indikator kesejahteraan negara merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini disebabkan karena pendapatan perkapita telah mencakup jumlah penduduk sehingga secara langsung dapat menunjukkan tingkat kemakmuran.

- 2) Standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun.
- 3) Sebagai pemodan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.
- 4) Pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. Pendapatan per kapita juga umum digunakan sebagai pembandingan tingkat kemakmuran antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dengan menetapkan standar per kapita, maka negara-negara didunia dapat dikelompokkan kedalam negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi.

Cara yang Ditempuh Pemerintah untuk Meningkatkan Output Per Kapita dan Pendapatan Masyarakat

Menurut MGMP Ekonomi (2014) cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk meningkatkan output per kapita dan pendapatan masyarakat antara lain:

- 1) Pemupukan permodalan untuk investasi sehingga dapat memperluas lapangan kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja supaya mendapatkan tenaga ahli sehingga dapat mengolah sumber daya alam.
- 3) Menyediakan fasilitas usaha yang memadai sehingga dapat merangsang munculnya investor baru.
- 4) Berusaha untuk membuat seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Hubungan Jumlah Penduduk terhadap PAD

Sucipto Wirosardjono (2012), menyatakan bahwa di negara yang sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula.

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset

modal dasar pembangunan tetapi sekaligus sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban, jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Agus, 2010).

Adam Smith (2010), berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah , melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Novianti Hendriyani (2017) yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Boyolali, dengan sampel penelitian data laporan keuangan pemerintah Boyolali pada tahun 2006-2015. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,759 yang berarti bahwa 75,9% pendapatan asli daerah dipengaruhi Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi, sedangkan 24,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Arief Eka Atmaja (2011) yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG”. Persoalan Pemerintah Kota Semarang adalah ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap transfer dari Pemerintah Pusat berupa DAU atau DAK. sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil. Dana transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi

Umum di Kota Semarang selalu meningkat di setiap tahunnya yang berarti Kota Semarang belum mampu mandiri tanpa bantuan pemerintah pusat. Untuk itu perlu di ketahui variabel apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat di simpulkan, secara bersama-sama Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara individual, Variabel Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang adalah Jumlah Penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5.742.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Devi Oktaviana (2012) yang berjudul “ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH :PENDEKATAN

ERROR CORRECTION MODEL “.

Dalam terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi keuangannya sendiri salah satunya yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), karena Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebut meliputi: pengeluaran pemerintah daerah jumlah penduduk dan PDRB. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data runtut waktu periode 1994-2008. Model estimasi yang digunakan Pendekatan *Error Correction Model*.

- 4) Penelitian yang dilakukan Ajeng Apridiyanti (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini menggunakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel kontrol. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Namun secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan

- 5) Penelitian yang dilakukan Parassela Pangestu (2019) yang berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jambi periode 2009 – 2017. Ada 9 Kabupaten, 2 Kota, dan 1 Provinsi yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, serta Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan masing-masing pemerintah daerah. Data penelitian berjumlah 60 data. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22 for windows. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, hasil menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis kedua, PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis ketiga DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

- 6) Penelitian yang dilakukan Takaaki Masaki (2018) yang berjudul “*The impact of intergovernmental transfers*

on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh transfer pemerintah terhadap pendapatan lokal. Sudah ada literatur yang mapan di bidang keuangan publik, yang berpendapat bahwa hibah antar pemerintah "menggeser" pendapatan daerah. Namun, sebagian besar studi yang ada mengeksplorasi implikasi fiskal dari transfer antar pemerintah di negara-negara berpenghasilan tinggi di mana sistem fiskal yang baik diterima begitu saja. Dalam tulisan ini, mengeksplorasi dampak transfer antar pemerintah terhadap pendapatan daerah di sub-Sahara Afrika, sebuah wilayah di mana kapasitas fiskal lokalnya terbatas dan secara endogen ditentukan oleh dukungan keuangan dari donor internasional dan pemerintah pusat. Tempat-tempat di mana kapasitas LGA yang ada untuk mengelola pemungutan pajak lemah dan biaya politik untuk menegakkan perpajakan rendah yang merupakan ciri abadi banyak distrik pedesaan di Afrika transfer antar pemerintah memfasilitasi perolehan pendapatan

lokal alih-alih merusaknya. Menganalisis data fiskal triwulanan yang baru tersedia tentang pendapatan daerah di Tanzania menunjukkan bahwa hibah antar pemerintah meningkatkan mobilisasi pendapatan daerah, dan juga bahwa efek positif dari transfer fiskal pada pengumpulan pendapatan daerah tampaknya lebih terlihat di kabupaten pedesaan.

- 7) Penelitian yang dilakukan Thushyanthan Baskaran (2016) yang berjudul "*Revenue decentralization, central oversight and the political budget cycle: Evidence from Israel*". Penelitian ini membahas apakah desentralisasi pendapatan dan pengawasan keuangan eksternal langsung mempengaruhi kejadian dan kekuatan siklus anggaran politik, menggunakan panel kota Israel selama periode 1999-2009. Kami menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat sebagaimana tercermin dari rendahnya bagian pendapatan daerah dalam anggaran kota memperburuk siklus anggaran politik. Kami juga menemukan bahwa pola ini sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran pembangunan. Hasil ini menunjukkan

bahwa siklus anggaran politik dapat dihasilkan dari lembaga fiskal yang menciptakan kendala anggaran yang lunak, di mana petahana dan pemilih yang rasional dapat mengharapkan bahwa biaya perluasan pra-pemilu akan sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat.

Kerangka Berpikir

Santosa dan Rahayu (2005) membuktikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk merupakan hubungan fungsional Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD

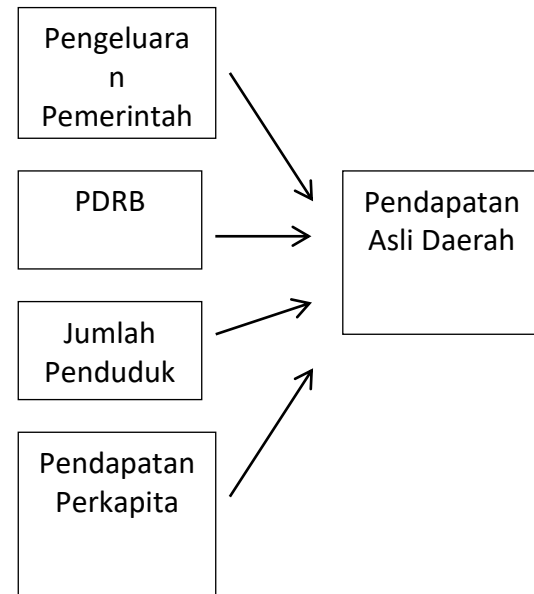
tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Gde Bhaskara dan A.A Bagus, 2014). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu

perekonomian (Mangkoesoebroto, 1998 dalam Sitaniapessy, 2013).

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejala ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejala ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan Susanto, 2014). Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Gde Bhasakara dan A.A Bagus (2014), adapun perbedaan penelitiannya adalah pada tempat penelitian. Gde Bhaskara dan A.A Bagus melakukan penelitian pada kota Denpasar, sedangkan penelitian ini pada Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian Gde Bhaskara dan A.A Bagus menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah meliputi PDRB, jumlah penduduk, sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yang meliputi pengeluaran pemerintah, jumlah

penduduk, PDRB, dan pendapatan perkapita. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian
Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, peneliti memperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut: “Ada pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo.”

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemetaan variabel menjadi variabel yang dapat diukur (Ferdinand, 2006). Definisi

operasional untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Wonosobo. Satuan dalam ribu rupiah, Data di ambil dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020.
- 2) Pengeluaran Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagi pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan di Kabupaten Wonosobo. Satuan dalam ribu rupiah. Dalam hal ini data Pengeluaran Pemerintah merupakan data yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020.
- 3) Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di Kabupaten Wonosobo. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020.
- 4) PDRB adalah Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah

(regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020.

- 5) Pendapatan Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini wilayah yang di maksud adalah Kabupaten Wonosobo. Data di ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020.

Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

- 1) Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama peneliti. Hakikat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yang di gunakan dalam sebuah model .Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk di jelaskan oleh seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah: Pendapatan Asli Daerah (Y).

- 2) Variabel independent

Variabel independen yang di lambangkan dengan (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang berpengaruh positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006). Variabel indepen dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo (X1)
- 2) PDRB Kabupaten Wonosobo (X2)
- 3) Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo (X3)
- 4) Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonosobo (X4)

Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data adalah informasi yang memiliki arti bagi penggunaannya. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo. Data bersifat time series dengan periode 2001-2020. Data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020
- 2) Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020

- 3) Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020
- 4) PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan tahun 2001-2020
- 5) Pendapatan perkapita Kabupaten Wonosobo tahun 2001-2020

Analisis Data

Untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan PDRB Kabupaten Wonosobo terhadap Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Ghozali (2009), mengatakan Ordinary Least Square (OLS) adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \quad (3)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pengeluaran Pemerintah Daerah

X_2 = Jumlah Penduduk

X_3 = Pendapatan Domestik Regional Bruto

X_4 = Pendapatan Perkapita

Selanjutnya perlu dilakukan adanya uji asumsi klasik dan uji statistik.

Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini di khususkan pad apenelaahan gejala autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokeditas.

1) Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Jika terdapat autokorelasi, maka parameter yang diestimasi akan bisa dan variannya tidak minima. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW test). Nilai dw yang diperoleh dibandingkan dengan dL pada table statistic d dari Durbin Watson.

$du < dw < 4-du$ = tidak ada autokorelasi

$dw < dL$ = ada autokorelasi positif

$dw > 4-dL$ = ada autokorelasi negative

$du < dw < dL$ = tidak dapat disimpulkan

2) Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Menurut Imam Ghozali (2009), Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh bariabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk mengukur ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah nilai tolerance dengan batas minimal sebesar 0,10 atau nilai VIF maksimal 10.

3) Pengujian Heteroskedaritas

Heterokedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varians yang tidak sama dari setiap unsure gangguan. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasi jenis heteroskedasitisitas ini adalah dengan melihat grafik scatterplot. Apabila dalam grafik scatterplot tidak menunjukkan suatu pola maupun bentuk yang tertenu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model

regresi tersebut tidak mengandung Heteroskedastisitas.

4) Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik uji normalitas normal plot. Model regresi memenuhi asumsi normalitas bila memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal (Ghozali, 2009).

Uji Statistik

1) Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2)

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika nilai R^2 kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel

dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.

2. Jika nilai R^2 mendekati 1 (satu), berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan.

2) Pengujian Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah:

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

$H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Pengujian ini dilakukan sebagai berikut:

Bila $F_{hit} < F_{tab}$, maka dapat disimpulkan terima H_0 tolak H_1 yang artinya semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas atau variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi: Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Daerah utara merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu (2.565 meter). Di sebelah selatan, terdapat Waduk Wadaslintang. Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang tertinggal di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah 22,02% dari kesuluruhan penduduk Kabupaten Wonosobo. Wonosobo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Wonosobo. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di sebelah timur, Kabupaten Purworejo di sebelah selatan, Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara di sebelah barat, serta Kabupaten Batang dan

Kendal di sebelah utara. Kabupaten Wonosobo didirikan pada tanggal 24 Juli 1825. Ia adalah kabupaten Kesultanan Yogyakarta setelah Perang Dipenegoro. Empa (Ngampah) adalah bupati pertama yang pernah bertugas di Diponegoro, gelarnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Setjonegoro.

Berdasarkan cerita rakyat, pada awal abad ke-17, tiga orang pengelana (bernama Kiai Kolodete, Kaii Karim, dan Kiai Walik) mulai mengembangkan pemukiman yang sekarang disebut Wonosobo. Selain itu, Kiai Kolodete tinggal di Dataran Tinggi Dieng, Kiai Karim tinggal di daerah Kalibeber, dan Kiai Walik tinggal di dekat kota Wonosobo saat ini. Belakangan, tokoh-tokoh seperti penguasa wilayah Wonosobo (seperti Tumongon Katowiceso) disebut penguasa wilayah Wonosobo, dan pusat kekuasaan mereka ada di Selomannik. Diketahui juga bahwa tokoh yang bernama Tumenggung Wiroduta (Tumenggung Wiroduta) adalah penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Pecekelan-Kalilusi, kemudian dialihkan ke Ledok yang sekarang. Salah seorang cucu Kiai Karim juga disebut sebagai salah seorang penguasa Wonosobo. Cucu Kiai Karim tersebut dikenal sebagai Ki Singowedono yang telah mendapat hadiah suatu tempat di Selomerto

dari Keraton Mataram serta diangkat sebagai penguasa daerah ini namanya diganti menjadi Tumenggung Jogonegoro. Pada masa ini pusat kekuasaan dipindahkan ke Selomerto. Setelah meninggal dunia, Tumenggung Jogonegoro dimakamkan di Desa Pakuncen. Selanjutnya pada masa Perang Diponegoro (1825 - 1830), Wonosobo merupakan salah satu basis pertahanan pasukan pendukung Diponegoro. Beberapa tokoh penting yang mendukung perjuangan Diponegoro adalah Imam Misbach atau kemudian dikenal sebagai Tumenggung Kertosinuwun, Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegaran, Gajah Permodo dan Kiai Muhamad Ngarpah.

Dalam pertempuran melawan Belanda, Kaii Muhamad Ngarpah (Kaii Muhamad Ngarpah) meraih kemenangan pertama. Supaya sukses, Pangeran Diponegoro menamainya Kiai Muhamad Ngarpah dan Tumenggung Setjonegoro. Selain itu, Tumenggung Setjonegoro (Tumenggung Setjonegoro) diangkat sebagai penguasa Ledoc dengan nama

Tumenggung Setjonegoro. Keberadaan kekuasaan Setonegoro di kawasan Ledoc dapat dilihat lebih jauh dari berbagai sumber, termasuk laporan Belanda yang dibuat setelah berakhirnya Perang Dipennegro. Disebutkan pula bahwa Setjonegoro adalah Bupati yang memindahkan pusat kekuasaan dari Selomerto ke wilayah Wonosobo saat ini. Berdasarkan hasil Simposium HUT Wonosobo pada 28 April 1994, tim peneliti dari Sekolah Sastra UGM, Muspida, Wonosobo dan para lansia, antara lain Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta, Pimpinan DPRD dan Panitia serta Instansi pemerintah Wonosobo yang menyetujui hari jadi diresmikan pada tanggal 24 Juli 1825. Data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa tingkat pendapatan asli daerah setiap tahun selalu bertambah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3. Data PAD, Jumlah Penduduk, PDRB, Pendapatan Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2002- 2019.

Tahun	PAD	Jumlah penduduk	PDRB	Pendapatan Perkapita	Pengeluaran Pemerintah
2002	12.205.000.000	720.681	12.914.709	2.021.667	70.100.234.811
2003	20.039.603.000	725.523	13.001.890	2.381.145	79.120.401.011
2004	23.315.752.000	729.778	13.116.110	2.419.008	81.028.017.790

2005	20.747.933.000	731.809	13.356.671	2.619.704	98.019.102.000
2006	24.445.686.000	735.273	13.578.110	2.845.198	99.102.812.010
2007	31.976.440.000	740.678	13.909.789	2.918.978	102.851.901.291
2008	36.904.132.928	746.098	14.179.800	3.289.167	115.167.190.000
2009	45.003.352.000	749.145	14.417.881	3.786.256	119.012.092.890
2010	46.003.352.000	756.094	14.890.145	4.017.821	127.011.922.000
2011	60.314.879.680	760.765	15.001.678	4.323.254	129.011.078.991
2012	55.451.119.700	765.189	15.199.240	4.784.241	172.891.789.178
2013	72.814.587.200	769.318	15.390.701	5.327.874	183.900.156.000
2014	126.737.232.802	773.280	15.598.140	5.891.297	273.189.780.165
2015	154.515.664.500	777.116	15.763.567	6.507.916	299.081.329.275
2016	177.947.569.560	780.667	16.156.509	6.915.627	341.126.957.109
2017	182.959.003.201	784.091	16.255.103	7.296.091	352.789.120.009
2018	205.810.310.500	787.347	17.493.244	7.852.899	360.100.901.789
2019	211.013.295.214	790.491	18.854.449	8.491.787	370.178.192.000

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD pada umumnya menunjukkan adanya perkembangan yang positif, dimana realisasi penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 2002 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2005 pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan. Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan asli daerah juga diikuti dengan peningkatan PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita.

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

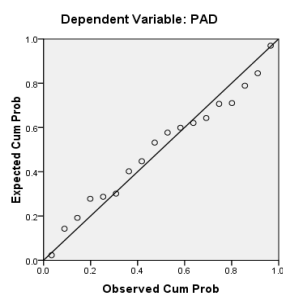
Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model linear berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas.

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan

menggunakan perhitungan koefisien determinasi (determination coefficient) yang disimbolkan dengan R^2 . Uji normalitas data ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik uji normalitas normal plot. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan bantuan program statistik SPSS 16 hasil Uji Normalitas data dapat dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data normal, gambar persebaran data adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data SPSS
Berdasarkan hasil gambar uji normalitas di atas dapat diketahui

bahwa persebaran data sesuai dengan garis normalitas. Persebaran data yang baik merupakan suatu kunci bahwa data yang diteliti bernilai normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dapat disimpulkan bahwa data yang didapat oleh peneliti bernilai normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel bebasnya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Hasil pengujian Koefisien Regresi dalam penelitian ini dibantu menggunakan SPSS 16. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah diantara variable bebas (indevenden) tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat hubungan yang signigikan antara variable. Hasil Uji multikolinearitas dengan menggunakan variance Inflation Factor (VIF) seperti pada table berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Data SPSS

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	634.877	403.548		1.573	.140		
	Jumlah Penduduk	-1.029	.518	-.329	-1.986	.069	.260	3.910
	PDRB	4.297	6.983	.097	.615	.549	.280	3.5247
	Pendapatan Perkapita	14.842	16.124	.432	.920	.374	.300	3.13046
	Pengeluaran Pemerintah	.504	.145	.788	3.473	.004	.140	7.3146

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen dalam model regresi yang digunakan kurang dari angka 10 sedangkan nilai

Tolerance lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kriteria
Jumlah Penduduk	0.260	3.910	Non Multicorelation
PDRB	0.280	3.5247	Non Multicorelation
Pendapatan Perkapita	0.300	3.13046	Non Multicorelation
Pengeluaran Pemerintah	0.140	7.3146	Non Multicorelation

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Jika terdapat autokorelasi, maka parameter yang diestimasi akan bisa dan variannya tidak minimal. Dalam penelitian ini autokorelasi dideteksi dengan menggunakan metode Durbin Watson (DW test). Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah

secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai dw yang diperoleh dibandingkan dengan dL pada table statistik d dari Durbin Watson. Uji autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai statistik Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Table 6. Hasil Uji Autokorelasi SPSS

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.991	.988	7.793119953	2.227

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 2,227. Berdasarkan tabel Durbin Watson, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Nilai data dari Durbin Watson dapat dilihat dari table dibawah ini:

$DU < D < 4-DU$
$0.9331 < 2.227 < 2.303$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson dari data yang diteliti lebih besar dari 0.9331 dan lebih kecil dari 2.303. Dapat disimpulkan

bahwa uji autokorelasi dari data penelitian tidak mengandung unsur autokorelasi.

4) Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varians yang tidak sama dari setiap unsure gangguan. Suatu model regresi dikatakan baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedestisitas SPSS

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-143.795	205.074		.496
	Jumlah Penduduk	.215	.263	1.153	.430
	PDRB	-.692	3.549	-.262	.848
	Pendapatan Perkapita	2.542	8.194	1.242	.761
	Pengeluaran Pemerintah	-.080	.074	-2.093	.299

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan table di atas menunjukkan nilai signifikansi dari seluruh variable kurang dari 1. Hal ini dapat berarti tidak terjadi heterokodastisitas pada model

regresi. Hasil secara rinci mengenai uji Heterokeses dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Heterokesestisitas

Variabel	Sig	Kriteria
Jumlah Penduduk	0.430	Non Heteroskedarisitas
PDRB	0.848	Non Heteroskedarisitas
Pendapatan Perkapita	0.761	Non Heteroskedarisitas
Pengeluaran Pemerintah	0.299	Non Heteroskedarisitas

Uji Statistik

1) Penafsiran Koefisien Determinasi

Penafsiran ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien

determinasi (determination coefficient) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Uji penafsiran koefisien determinasi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 9. Penafsiran Koefisien determinasi SPSS

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.991	.988	7.793119953

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0.988, nilai R lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi bariabel dependen, maka

dapat disimpulkan antara variabel bebas dan bariabel tak bebas ada keterkaitan.

2) Pengujian Koefisien Regresi (Uji f)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap

variabel tak bebas. Hasil pengujian Koefisien Regresi dalam penelitian ini dibantu menggunakan SPSS 16. Hasil

uji dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Regresi (Uji f) SPSS

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85463.596	4	21365.899	35.1802	.000
	Residual	789.525	13	60.733		
	Total	86253.121	17			

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai f adalah 35.1802. Nilai f tabel berdasarkan data adalah 3.20, jadi nilai f hitung lebih besar dari f tabel. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel disini berarti jumlah penduduk, PDRB, pendapatan perkapita, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah secara individual variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) SPSS

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	634.877	403.548		1.573	.140
	Pengeluaran Pemerintah	.504	.145	.788	3.473	.004

Pendapatan Perkapita	14.842	16.124	.432	.920	.0374
PDRB	4.297	6.983	.097	.695	.0459
Jumlah Penduduk	-1.029	.518	-.329	-1.986	.0069

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari semua variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 0.05.

Tabel 12. Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pengeluaran Pemerintah	$0.004 < 0.05$	ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD
Pendapatan Perkapita	$0.0374 < 0.05$	ada pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD
PDRB	$0.0459 < 0.05$	ada pengaruh PDRB terhadap PAD
Jumlah Penduduk	$0.0069 < 0.05$	ada pengaruh jumlah penduduk dengan PAD

1. Pengeluaran Pemerintah

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Nilai R hitung $< R$ tabel, R tabel dalam penelitian ini adalah 0,688 jadi $3.473 < 0,688$. Dari perhitungan tabel t bisa disimpulkan bahwa semakin bertambahnya

pengeluaran pemerintah akan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

2. Pendapatan Perkapita

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0374 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Nilai R hitung $< R$ tabel, R tabel dalam penelitian

ini adalah 0,688 jadi $0,920 < 0,688$. Dari hasil uji tabel t dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita maka Pengeluaran Asli Daerah akan meningkat.

3. PDRB

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0459 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Nilai R hitung $< R$ tabel, R tabel dalam penelitian ini adalah 0,688 jadi $0,695 < 0,688$. Dari hasil uji tabel t dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB maka Pengeluaran Asli Daerah akan meningkat.

4. Jumlah Penduduk

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0069 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Nilai R hitung $< R$

tabel, R tabel dalam penelitian ini adalah 0,688 jadi $1,986 < 0,688$. Dari hasil uji tabel t dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Jumlah Penduduk maka Pengeluaran Asli Daerah akan menurun.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. pengaruh tersebut dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan membahas mengenai hal tersebut.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah yang dilakukan oleh

pemerintah akan berpengaruh apda pendapatan asli daerah, semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka pemerintah akan mengejar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi juga. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-propinsi-daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran- ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Analisis Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0459 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena PDRB merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. PDRB juga merupakan komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan) penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu

wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Hal di atas sesuai dengan pendapat bahwa penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan) penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012). Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0069 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Jumlah penduduk yang banyak akan membuat penerimaan pemerintah daerah dari sector pajak akan tinggi. Penduduk juga merupakan asset bagi suatu daerah untuk membangun sekaligus mampu meningkatkan produktifitas suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adam Smith (dalam Santoso dan Retno, 2005) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis pengujian koefisien regresi parsial (uji t), didapatkan bahwa secara signifikan terdapat pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t) didapat angka $0,0374 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Pendapatan perkapita yang tinggi akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah karena pajak yang diterima oleh pemerintah akan semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Menurut Sodikin dan Riyono (2014:37), “Penghasilan

(income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh tertinggi dari pendapatan asli daerah, selanjutnya adalah jumlah penduduk, pendapatan perkapita, dan PDRB. Dari empat faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, peneliti menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja daerah, pembangunan daerah, dan dana untuk hal lain merupakan faktor tertinggi yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,759 yang berarti bahwa 75,9% pendapatan asli daerah dipengaruhi Pengeluaran

Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi, sedangkan 24,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diketahui bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai uji t $0.004 < 0.05$. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari belanja daerah yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah daerah diberikan hak sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk mengatur belanja daerah, sehingga pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).
- 2) Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah. Berdasarkan hasil pengujian

koefisien regresi parsial (uji t) diketahui bahwa ada pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai uji t $0.0374 < 0.05$. Jumlah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), karena sumber dana PAD yang utama ada pada pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat.

- 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diketahui bahwa ada pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan nilai uji t $0.0459 < 0.05$.
- 4) Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi parsial (uji t) diketahui bahwa ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah

(PAD) dengan nilai uji t $0.0069 < 0.05$. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Saran

Dari kesimpulan di atas peneliti akan memberikan saran dan implikasi, diantaranya adalah:

- 1) Sarana dan prasarana di daerah sekitar tempat-tempat wisata perlu ditingkatkan sehingga dapat menarik banyak wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga dapat meningkatkan hasil pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan pemerintah. Dampak positifnya terhadap masyarakat sekitar yaitu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
- 2) Dengan terjadinya peningkatan PDRB yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperbaiki dalam

hal kualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan PDRB dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai pula.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Bagus Putu Widanta, G. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, ISSN: 2303-0178 Vol. 3, No. 5.
- Abdul Halim. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2016.
- Adam Smith, 2010. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adelina Simanjuntak, Risma. 2010. "Analisis beban kerja mental dengan metode Nasa-TLX". Teknik industri, Institusi sains & Teknologi AKPRIND: Yogyakarta.
- Augusty, Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahyari, Agus. 2010. Manajemen Produksi, Pengendalian Produksi, Edisi 4. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Alimul Hidayat A.A., (2010). Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif, Jakarta: Heath Books
- Arsyad, Lincoln. (1999). Pengantar

- perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.
- Awaniz, Berlian Nur. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Budi, Purbayu Santosa & Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. Jurnal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Casson, A., & Obidzinski, K. (2012). *From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of "Illegal" Logging in Kalimantan, Indonesia*. *World Development*, 30(12), 2133–2151. doi:10.1016/s0305-750x(02)00125-0
- De Carvalho, J. C., Borghetti, I. A., Cartas, L. C., Woiciechowski, A. L., Soccol, V. T., & Soccol, C. R. (2018). *Biorefinery integration of microalgae production into cassava processing industry: Potential and perspectives*. *Bioresource Technology*, 247, 1165–1172. doi:10.1016/j.biortech.2017.09.213
- Ghozali, Imam. 2009. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS ". Semarang : UNDIP.
- Greuning, Hennie Van. et al. 2013. *International financial reporting standards : sebuah panduan praktis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Iwan, & Susanto. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012). Jurnal Ilmiah, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
- Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Sylvia Veronica Siregar (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta: Salemba.
- Holland, E. C., Dahlman, C. T., & Browne, M. (2020). *The arc of autonomy in Georgia's Ajara*. *Political Geography*, 80, 102177. doi:10.1016/j.polgeo.2020.102177
- Landiyanto. E. A, 2015. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1.
- Lau, Peter dan Nelson, Lam. 2014. Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting) Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prakoso, T., Indra B. K., R., dan Heru N. 2007. Esterifikasi Asam Lemak Bebas dalam Minyak Sawit Mentah Untuk Produksi Metil Ester. Jurnal Teknik Kimia Indonesia. 6 (3), hlm. 105 – 109.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.5 No.2.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- Sitaniapessy, H. A. (April 2013.).
“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD”. Jurnal Economica, Vol 9, No.1.
- Sodikin dan Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar I. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Suryaningrat,Bayu. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Aksara Baru.
- Todaro, Michael. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. EdisiKetujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Uma Sekaran, 2006. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, DirektoratJenderal Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Wirosardjono, Sucipto. 2012. Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa,Prisma, No 3 Tahun XVII